



LAPORAN PENELITIAN

**KONFLIK "SYIAH-SUNNI" SAMPANG:
Jalan Terjal Menuju Rekonsiliasi**

**Pesantren untuk Perdamaian (PFP):
Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan
Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

Oleh:

Oleh Mohamad Nabil

**Pesantren for Peace (PFP):
A Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to
Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution**



The project is co-funded by
the European Union

Implemented by



Konrad
Adenauer
Stiftung



KONFLIK “SYIAH-SUNNI”¹ SAMPANG: Jalan Terjal Menuju Rekonsiliasi

Oleh Mohamad Nabil

BAB I PENGANTAR

Hari itu, Ahad, 26 Agustus 2012, persis enam hari setelah Idul Fitri 1433 Hijriah, sedianya adalah hari yang “istimewa” bagi masyarakat Madura. Disebut istimewa karena di samping baru kelar merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan saling memaafkan satu sama lain, mereka juga hendak merayakan Lebaran Ketupat (*Tellasan Topa*) yang biasa dirayakan setiap hari ke-7 bulan Syawal. Memang tidak ada ritual khusus pada *Tellasan Topa* sebagaimana Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ada hanyalah aktivitas sosial dan kultural yang sudah menjadi tradisi sejak lama, yaitu saling *ter ater* (mengantar ketupat) pada sanak saudara, tetangga, dan untuk sebagian ke *langger* (langgar atau musholla) atau masjid. Aktivitas ini adalah suatu cerminan yang memperlihatkan bahwa masyarakat Madura tetap setia memelihara kultur dan tradisi mereka dalam rangka menjaga keakraban, persaudaraan, dan solidaritas sosial yang telah diwariskan oleh para leluhurnya sejak lama.

Akan tetapi suasana meriah dan bersahaja yang demikian tidak terjadi di dua tempat: Dusun Nang Kernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang. Keduanya berada di Kabupaten Sampang. Di dua tempat ini yang terjadi malah penyerangan massal berdarah antara massa yang mengaku sebagai penganut Ahlussunnah Wal Jamaah (Sunni) dan komunitas Syi’ah. Dua kelompok yang

¹ Sebagian Kiyai-Kiyai di Madura yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik Syiah di Sampang tidak setuju dengan penyebutan konflik “Syiah-Sunni” di Sampang. Penyebutan tersebut dianggap tidak tepat karena hampir sebagian besar Kiyai dan masyarakat Madura yang Sunni justru tidak terlibat dalam konflik tersebut dan hanya sedikit sekali Kiyai yang terlibat secara langsung. Bahkan beberapa Kiyai muda di Madura berpendapat, penyebutan konflik “Syiah-Sunni” sengaja dipakai sebagai alat legitimasi kelompok-kelompok intoleran untuk mengusir para penganut Syiah keluar dari Sampang.

memiliki paham keagamaan berbeda ini “bentrok” justru pada hari *Tellasan Topa*, hari yang sebenarnya sakral bila dimaknai secara sosial dan kultural. Korban pun tak bisa dihindari, ada yang meninggal, sekolah, *langger*, rumah, dapur, dan kandang banyak yang terbakar, luluh lantak. Menurut catatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Sampang, ada 192 berbagai jenis bangunan dari 39 pemilik, luluh lantak. Untuk menghindari bertambahnya korban, aparat keamanan mengevakuasi para penganut Syi’ah ke Gedung Olahraga (GOR) di pusat kota Sampang yang jumlahnya kurang lebih 250 orang.² Tak hanya sampai di situ, belakangan para penganut Syi’ah justru diungsikan dari GOR Sampang ke Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, dan sampai kini mereka belum dibolehkan pulang ke kampung halamannya jika tak ingin melakukan pertobatan—meninggalkan paham Syi’ah dan kembali ke Sunni—dengan taubatan *nasuha* (taubat yang sungguh-sungguh).

Tragedi berdarah sebagaimana telah digambarkan di atas bukanlah yang pertama. Sebelumnya sudah banyak rentetan peristiwa lain yang menyertainya dalam skala yang lebih kecil dan terbatas. Tragedi 26 Agustus 2012 merupakan puncak dari kegagalan pemerintah Kabupaten Sampang dan para pihak terkait dalam mencegah dan menangani konflik tersebut yang sesungguhnya mulai meletup sejak awal-awal tahun 2000an. Dalam laporan sejumlah lembaga, peneliti dan para ahli, sebelum bentrokan terakhir, kurang lebih ada lima belas pertemuan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Sampang di dalamnya, untuk mencari jalan keluar konflik “Sunni-Syi’ah” tapi semuanya gagal. Bermula dari peserteruan pendapat dua tokoh yang masih sepupu, Kiyai Makmun (Syi’ah) dan Kiyai Karrar (Sunni), kemudian berlanjut ke anaknya Kiyai Makmun, Tajul Muluk melawan Kiyai Karrar, dan belakangan menjadi segi tiga antara Tajul Muluk, Kiyai Karrar, dan Raisul Hukama. Nama terakhir merupakan adik kandung dari Tajul Muluk sendiri. Setelah konflik segi tiga ini situasinya semakin rumit dan eskalatif. Di samping soal dakwah Syi’ah yang eksapansif, keberimbangan sosial, perebutan santri dan otoritas, soal asmara dan lain sebagainya, yang pasti konflik ini bermula dari suatu bentuk “intoleransi” terhadap perbedaan pemahaman. Intoleransi ini kemudian meluas, tidak hanya melibatkan perseteruan inti antara Kiyai Karrar dan

² Data para penganut Syiah yang diungsikan ke GOR Sampang, dan kemudian ke Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, jumlahnya memang berbeda-beda menurut beberapa lembaga maupun media. Menurut Majalah Tempo, jumlah para pengungsi 217 orang, Bakesbangpol Kabupaten Sampang merilis 201 orang. Sedangkan menurut Ustadz Iklil, salah satu pimpinan komunitas Syiah Sampang, yang mengungsi kurang lebih 75 KK dan terdiri dari 318 jiwa.

Ustadz Tajul Muluk, tetapi melibatkan pendukungnya masing-masing. Pola ini menurut Gerry van Klinken merupakan penyakit bawaan dari suatu konflik. Mula-mula ia kecil atau laten, lalu bergeser dari konflik biasa—perseteruan antar dua orang—menjadi kekerasan komunal berbau agama. Gerry van Klinken menyebut pergeseran konflik semacam ini sebagai ‘pergeseran skala’ (*scala shift*) dari dinamika pertikaian (*dynamics of contention*), yang mana “jumlah dan tingkatan tindakan perseteruan meningkat, mengakibatkan perseteruan yang lebih besar, melibatkan aktor-aktor yang lebih luas dan menjembatani klaim-klaim mereka dengan identitas-identitas mereka.”³

BAB II GAMBARAN UMUM KONFLIK

Sejarah dan Benih Konflik

Benih konflik Sunni-Syiah di Desa Nangkernang dan Blu’uran Kecamatan Omben dan Karangpenang, Kabupaten Sampang muncul sejak seorang tokoh ulama setempat, Kiyai Makmun, berniat mengirim anaknya untuk menuntut ilmu ke Pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil, Pasuruan, antara 1987 hingga 1993. Pesantren tersebut dikenal cenderung kepada madzhab Syiah.⁴ Keputusan Kiyai Makmun tersebut diambil setelah beliau tertarik dengan sosok Imam Khomaeni dan ajaran Syiah dengan mempelajari buku-buku yang dikirim sahabatnya dari Iran. Keputusan Kiyai Makmun selanjutnya diketahui dan ditentang oleh sepupunya, Kiyai Ali Karrar Shinhaji, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid di Kabupaten Pamekasan yang saat itu baru pulang belajar dari Mekkah karena dianggapnya bertentangan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kiyai Makmun adalah ayah dari Tajul Muluk dan Raisul Hukama yang belakangan berkonflik.

Kiyai Karrar menjaga jarak dengan Kiyai Makmun setelah Kiyai Makmun diketahui menganut Syiah. Bahkan menurut Iklil, putra Kiyai Makmun, keduanya pernah perang argumen soal wafatnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husein, yang menurut Kiyai Karrar keduanya meninggal sejak kecil. Namun, pandangan itu diluruskan oleh Kiyai Makmun dalam rangka membantah pandangan Kiyai Karrar bahwa jika mereka berdua

³ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Obor dan KITLV, 2007), h. 120-121.

⁴ Syiah hadir di tengah masyarakat Madura yang berjumlah 3,62 juta jiwa (versi BPS 2010), yang hampir seluruhnya adalah mayoritas Islam Sunni (NU) yang fanatik.

wafat sejak kecil mengapa Sayyed Maliki al-Hasani yang merupakan keturunan Hasan menjadi gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya pernah berdebat soal keyakinan masing-masing namun belum berujung pada konflik berdarah.

Pasca Kiyai Makmun Wafat

Episode kebencian Kiyai Karrar terhadap Syiah terus berlanjut hingga ke putra Kiyai Makmun yang bernama Ali Murtadha (sapaan Tajul Muluk). Sepulang dari Arab Saudi, Ali Murtadha sapaan Tajul, membangun pesantren pada tahun 2004 atas dukungan warga desa yang pernah berguru ke Kiyai Makmun. Pesantren tersebut selanjutnya diberi nama Misbahul Huda. Pada tahun itu juga Kiyai Makmun wafat. Tajul melanjutkan perjuangan sang ayah mengajar dan berdakwah. Sikap Tajul yang egaliter, supel, ringan tangan, cekatan, dan tidak bersedia menerima imbalan setiap ceramah membuat Tajul menjadi kiai muda yang dihormati di Karang Gayam. Dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di Blu'uren (desa tetangga) telah menjadi pengikut Syiah dan murid Tajul yang setia.

Perkembangan dakwah Tajul dalam menyebarkan Syiah akhirnya mendapat respon Kiyai Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo yang masih kerabat dekat Kiyai Makmun. Hal itu selanjutnya diikuti para ulama setempat menentang keras penyebaran Syiah dengan mengintimidasi komunitas minoritas Syiah Sampang yang dianggap sesat. Sebelumnya, saat Kiyai Makmun masih hidup, Kiyai Karrar tidak secara terbuka menentang dakwah Tajul Muluk karena masih menaruh rasa hormat terhadap ayahnya. Kiyai Karrar sangat berkeberatan dan tidak menyetujui aktivitas dakwah Tajul Muluk yang mengajarkan Syiah. Baginya, Syiah adalah mazhab dalam Islam yang salah dan sesat.⁵

Kiyai Karrar mulai menghimpun elite agama untuk membangun gerakan anti Syiah dan melabelinya sebagai aliran sesat. Tahun 2005 Kiyai Karrar berupaya membendung laju Syiah melalui pengajian akbar, Maulid Nabi hingga Majelis Ta'lim, yang dihadiri ratusan hingga ribuan masyarakat sebagai panggung deklarasi menentang Syiah. Syiar kebencian dan penyesatan terus berkembang di tengah masyarakat. Upaya Kiyai Ali Karrar untuk melakukan penyesatan terhadap Syiah semakin intens melalui BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura) yang dimanfaatkannya untuk terus mendorong MUI

⁵ "Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang," KontraS Surabaya 2012.

di empat kabupaten di Madura untuk menyesatkan Syiah yang dianut Tajul Muluk. Upaya Kiyai Karrar selanjutnya membuahkan hasil karena pada tahun 2007 masyarakat sudah mulai menggugat dan memusuhi ajaran Syiah.

Masyarakat setempat menyerap dakwah para kiyai anti Syiah apa adanya tanpa klarifikasi, karena bagi warga Madura kiyai/ulama *waratsatul amnbiya'* (pewaris para nabi). Ketaatan mereka sangat kuat karena kiyai tidak hanya ber status imam di masjid, memimpin seremonial keagamaan seperti tahlilan, melainkan juga berperan sebagai hakim penentu kesalahan dan kebenaran. Kiyai Karrar terus mengagitasi masyarakat untuk menempatkan Syiah sebagai musuh bersama, apalagi Tajul bagi Kiyai Karrar dianggap sebagai gembong Syiah karena telah dilantik sebagai Pengurus Daerah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Kabupaten Sampang periode 2007-2010 sebagai Ketua Umum. Sedangkan adiknya, Raisul Hukama, menjabat sebagai Dewan Penasehat. Namun, Kiyai Rais Hukama, disapa Rais, kemudian memutuskan untuk pindah ke pihak Sunni dan merapat ke Kiyai Karrar.⁶

Rais dan Momentum Penyesatan

Garis Sunni dan Syi'ah semakin tegas sejak Raisul Hukama menyatakan dirinya keluar dari Syiah dan kembali ke Madzhab Sunni. Adik kandung Tajul Muluk tersebut menambah runyam persoalan antarmazdhab itu dengan menghembuskan isu yang memancing emosi warga Sunni. Isu agama yang dihembuskan Kiyai ke warga setempat mulai dari cara shalat, wudhu dan ibadah penganut Syiah lainnya yang dianggapnya hanya meniru-niru kaset dari Iran, bahkan isu agama yang berkembang di tengah masyarakat bahwa istri-istri orang Syiah boleh dipinjamkan ke orang lain. Kiyai juga menjelaskan bahwa penyerangan terhadap Tajul Muluk bukan karena perselisihan antara dirinya dan kakak kandungnya melainkan masyarakat Sampang mengetahui ajaran sesat Tajul yang menghina sahabat Nabi yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan.

Kiyai menjadi energi baru bagi ulama yang tergabung dalam BASRA untuk semakin menyudutkan Syiah. Pada periode 2009-2010, intimidasi dan tekanan terhadap warga Syiah melalui mobilitas massa semakin intensif. Para ulama yang tergabung dalam BASRA mengeluarkan ultimatum agar mereka kembali ke jalan Ahlusunnah Wal

⁶ AMAN (The Asian Muslim Action Network) Indonesia, *Dilema Kebebasan Beragama di Indonesia: Studi Kasus Pembakaran Rumah Ibadah di Sampang Madura*, 2012.

Jamaah. Perselihan antara Tajul dan adik kandung terjadi saat syiar kebencian kepada Syiah makin gencar di awal tahun 2010. Sejak saat itulah Pihak Tajul semakin terjepit karena Rais yang menjabat Dewan Penasehat IJABI tiba-tiba memutuskan keluar dari Syiah dan bergabung dengan kelompok Sunni Kiyai Ali Karrar. Sebaliknya, kelompok Kiyai Karrar semakin menguat sebab Rais selanjutnya membongkar ajaran Tajul Muluk.

Perseteruan Tajul dan Rais berawal dari kisah seorang santri di pesantren Misbahul meminta Tajul untuk meminang seorang gadis bernama Halimah yang ternyata santri Raisul Hukama. Tajul kemudian meminangkan Halimah untuk Latif tanpa sepengetahuan Rais. Hal tersebut membuat Rais geram. Belakangan diketahui, Rais menyukai Halimah dan hendak memperistrinya. Sejak itulah Rais keluar dari Syiah (15 Desember 2009) dan memutuskan mejadi penganut Sunni, paham yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat. Sejak itu Rais gencar memojokkan Syiah, paham yang dianut sebelumnya.⁷

Kontestasi wewenang dan otoritas antara Tajul dan Rais juga menjadi faktor lain yang memicu konflik antarkeduanya. Jumlah santri yang dimiliki Rais terus berkurang akibat wali santri di pesantren Rais sudah menarik anak-anak mereka keluar dan memindahkannya ke pihak Tajul. Alasan pemindahan tersebut karena anak mereka tidak didik dengan baik disamping, menurut pihak Tajul, dipicu oleh kebiasaan buruk Rais yang suka kawin cerai.

Kasus kekerasan yang dialami oleh jamaah Syi'ah di Kecamatan Omben berlangsung sejak 2004, klimaksnya adalah aksi pembakaran rumah Ustadz Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah jamaah Syi'ah lainnya dan *mushalla* yang digunakan sebagai sarana peribadatan. Aksi itu melibatkan 500 orang massa yang mengklaim sebagai massa *ahl as-sunnah wa al-jamaah*, dan merupakan kedua kalinya pada bulan Desember 2011.

Sebelumnya, aksi pembakaran rumah Jamaah Syi'ah juga terjadi di Desa Blu'uran, Karang Penang, Sampang pada 20 Desember 2011, dini hari. Massa secara sengaja ingin mencelakai dan membunuh Moh. Sirri sekeluarga. Tajul Muluk sendiri akhirnya diusir dari Sampang pada 16 April 2011, Pengusiran difasilitasi oleh Bupati dan Muspida, Bakesbanglinmas Sampang, dan Gubernur Jawa Timur. Sebelum diusir dari Sampang, Ustadz Tajul Muluk, sempat mendekam 12 hari di Polres Sampang.⁸ Insiden susulan terjadi pada 26 Agustus 2012 massa bersenjata tajam dan bom Molotov berkumpul di

⁷ AMAN, *Dilema Kebebasan Beragama*, 2012.

⁸ Cmars, Negara Gagal Melindungi Jamaah Syi'ah
Sampang, <http://www.andreasharsono.net/2011/12/negara-gagal-melindungi-jamaah-syiah.html>.

desa Nangkernang. Akibat penyerangan tersebut satu orang tewas (Hamama 50 Tahun), 10 orang lainnya menderita luka kritis, puluhan warga lainnya mengalami luka-luka ringan. Atas kejadian tersebut 40 rumah terbakar termasuk rumah Tajul Muluk yang sebelumnya pernah dibakar oleh pelaku yang sama.

Tajul Melawan Tradisi

Kehadiran Sosok Tajul mengundang ketidaksukaan tokoh agama sekitar. Apalagi dalam waktu yang cukup relatif singkat, Tajul Muluk berhasil mendapatkan banyak jamaah. Karakter Tajul sangat berbeda dengan kiai-kiai setempat pada umumnya yakni tidak menjaga jarak antara dirinya dengan masyarakat. Tajul turun gunung mendengarkan langsung keluhan dan membantu mencari solusinya. Pergeseran struktur sosial di masyarakat menjadi tak terhindarkan, di mana otoritas kiyai dan aparat pemerintah lokal mulai berkurang berkat kepedulian, kebaikan dan terobosan-terobosan Ustadz Tajul atas masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat.

Dalam perayaan keagamaan seperti maulid Nabi, Tajul tidak menolak *maulidan*, melainkan hanya mengubah tradisi lama yang sudah dianut mayoritas masyarakat setempat. Tradisi maulidan yang dirayakan oleh warga di tiap masing-masing rumah diubah menjadi perayaan bersama yang diselenggarakan secara bersama-sama untuk membantu warga yang kurang mampu. Gebrakan Tajul tersebut, kata adik kandung Tajul (Iklil), mengusik dan mengganggu “lahan” dan “pendapatan” Kiai dan Ustad.

Demikian juga ketika ada warga yang meninggal dimana kebanyakan masyarakat Sampang, termasuk masyarakat yang kurang mampu, memotong ternak (sapi) dan lain sebagainya untuk menyuguhi mereka yang datang untuk mendokan (tahlil). Pihak Tajul tetap tahlilan namun mereka menyarankan, seharusnya yang tertimpa musibah dibantu bukan justru menjual atau pun menghabiskan harta yang mereka punya. Sikap yang demikian dianggap menyeberang dan melawan tradisi yang sudah mapan. Gebrakan Tajul dalam bidang keagamaan dan sosial serta kedekatannya dengan masyarakat mempermudah jalan dakwahnya untuk diterima oleh warga sekitar, hingga akhirnya meresahkan kelompok anti Syiah.

Dari Aktor hingga Eksekutor

Sudah menjadi rahasia umum bahwa peran Kiyai Karrar atas pecahnya bentrok berdarah antar penganut Syiah dan Sunni sangat dominan sejak awal penyerangan tahun 2006. Kiyai Karrar dinilai sebagai aktor intelektual atau otak di balik pecah konflik Syiah-Sunni. Kiyai Karrar di kalangan sebagian ulama dikenal sosok yang alim, keras dan berani namun tidak mau mendengar masukan atau pendapat orang lain apalagi berdiskusi.⁹ Ulama yang tidak sepakat atas manuver Kiyai Karrar menyebutnya Kiyai intoleran. Selanjutnya, cikal-bakal konflik itu terlacak sejak awal saat Kiyai Makmun, ayah dari pemimpin jamaah Syiah di Sampang, masih hidup.

Kiyai Karrar juga disebut-sebut ikut mengirimkan santrinya ke lokasi demi membantu penyerangan yang dilakukan terhadap Tajul Muluk. Dari beberapa data didapatkan bahwa dugaan pengerahan massa itu karena mereka tidak datang secara satu-persatu, melainkan menggunakan mobil *pick-up*. Mobilisasi massa tersebut menjadi bukti bahwa elite ikut berperan dalam konflik ini.¹⁰

Nama yang paling banyak disebut selanjutnya atas tragedi berdarah di Sampang adalah Raisul Hukama, Saudara kandung Tajul Muluk. Pilihan Rais untuk bergabung dengan Kiyai Karrar menambah masifnya dakwah penyesatan atas Syiah hingga menambah pecahnya konflik lanjutan. Pilihan Rais untuk memisahkandiri dari Syiah tidak hanya terletak pada persoalan wanita seperti yang sudah disebut sebelumnya. Faktor lainnya adalah, pengaruh Tajul lebih kuat terhadap masyarakat. Tajul dikenal sangat dekat dan lebih serius mengurus santrinya dari pada Rais. Santri-santri Rais banyak ditarik oleh para wali santri dan dipindahkan ke pesantren Tajul karena dinilai sungguh-sungguh dalam mendidik santrinya.

Pihak Tajul Muluk menuding Kiyai Karrar sebagai penyulut konflik yang diikuti oleh murid-muridnya alumni Ponpes Darut Tauhid, Proppo Pamekasan. Nama-mana dari pesantren lainnya yaitu K. Muhaimin dari Enjelen, Sampang. Pesantren Kiyai Karrar dan Kiyai Muhaimin sama-sama Darut Tauhid namun lokasinya berbeda, yang pertama di Pamekasan dan yang kedua di Sampang. Penyesatan terhadap Syiah pertama kali dihembuskan melalui Tabloid Mujahidin yang disebar ke rumah-rumah yang isinya memprovokasi. Tabloid maupun bulletin anti Syiah, menurut pihak Tajul, sengaja

⁹ Karakter Kiyai Karrar tersebut diungkap oleh K. Damanhuri Fauzi dan Kiyai Syuaibi, Tim Rekonsiliasi Konflik Syiah-Sunni Sampang. Wawancara 4 Maret 2015 di Pamekasan.

¹⁰ Ita Anistianah, *Elit dan Konflik Komunal Keagamaan*, (Jawa Tengah: Parist, 2012), h. 68

dimunculkan oleh alumni Universitas Maliki, Saudi Arabia, antara lain Kiyai Karrar Abdul Jalil Nawawi dan Kiyai Karrar.

Isu syiah terus berkembang sehingga gerakan Kiyai Karrar dan Muhaimin menyeret nama-nama seperti Kiyai Syafi' dan Kiyai Mahrus, keduanya dari Gersempal. Meskipun pada tahun 2011 K. Muhaimin mengundurkan diri, diketahui, Kiyai Syafi' ikut aktif mendukung Pak De Karwo di Pilkada Jatim, sedangkan Kiyai Mahrus sama-sama di BASRA.

Dakwah penyesatan terhadap Syiah dilakukan para kiai tersebut melalui pengajian-pengajian, penyesatan terhadap ajaran-ajaran syiah terus direproduksi hingga akhirnya begitu dekat di telinga masyarakat. Syiah dinilai sebagai ancaman dan harus diusir dari Sampang. Dakwah provokatif akhirnya mampu mendorong massa untuk melakukan tindakan anarkis.

Elit agama anti-Syiah tersebut menggunakan otoritas karismatik untuk meraih dukungan massa, serta memobilisasi massa sehingga konflik akhirnya pecah. Sedangkan pola komunikasi dan interaksi Kiyai anti Syiah dengan Tajul di dalam mencari solusi mengindikasikan adanya senioritas atau stratifikasi tokoh keagamaan. Karena usianya masih muda, Tajul seolah dipaksa untuk menghormati arahan yang disampaikan mereka. Pola komunikasi tersebut bersifat *top-down*, dari atas ke bawah alias bersifat menekan dan memerintah. Inilah jalan buntu penyelesaian tragedi berdarah di Sampang.

Eksekutor Alias *Bleter* (*Bejingan*)

Bejingan berarti kelompok pelaku kriminal termasuk mencuri, berjudi dan lain sebagainya. Bejingan (preman) mempunyai aturan masing-masing dan memiliki daerah operasi sesuai dengan aturan main di kalangan mereka. Namun, mereka sangat patuh terhadap Kiyai, dan kepatuhan inilah yang dimanfaatkan ketika konflik Sunni-Syiah pecah di Sampang. Selain manut atas perintah Kiyai para bejingan ini memang tidak senang dengan Tajul Muluk karena mendorong warga membangun poskamling untuk menjaga ternak dan harta benda mereka dari para pencuri alias bejingan.¹¹

Sosok yang paling menonjol di kalangan bejingan ini adalah Ahmad Sahwi. Nama ini semakin santer disebut dan sudah mengakui dirinya sebagai pelaku. Hubungan Ahmad Sahwi dengan para kiyai anti-Syiah merenggang sebab merasa ditelantarkan oleh para

¹¹ Wawancara dengan Ustadz Iklil, Sidoarjo, 26 Februari 2015.

ulama anti-Syiah. Ahmad Sahwi kesal karena hanya merasa dimanfaatkan oleh mereka dan tidak satupun Kiyai anti-Syiah menjenguknya di penjara. Ahmad Sahwi adalah salah satu bejangan di antara bejangan lainnya yang terlibat. “Siapa yang butuh, saya apa Kiyainya? Kalau saya yang butuh saya datang (ke Kiyai), tapi kalau kiyainya yang butuh, maka kiyainya harus datang (ke Saya),” kesal Ahmad Sahwi.¹²

Peran para bejangan tersebut sangat penting dalam penyelesaian konflik Syiah-Sunni di Sampang. Kiyai Syuaibi, tim rekonsiliasi konflik Sampang bahkan terus berkomunikasi dengan mereka termasuk dengan masyarakat. Komunikasi yang mulai cair dengan mereka menjadi modal untuk memulangkan para pengungsi Syiah. Potensi untuk memulangkan pengungsi semakin terbuka tinggal menunggu sikap pemerintah dengan memutus segala kepentingan yang bermain.

Faktor Politik dan BASRA

Aroma transaksi politik muncul saat Menteri Agama, Suryadharma Ali (waktu itu) justru menodorong warga Syiah agar bertobat dan menjadi penganut Sunni. Kecurigaan yang muncul saat itu adanya transaksi yang dapat menguntungkan salah satu partai. Menteri Suryadharma Ali (SDA) dan Bupati Sampang Fanan Hasib, sama-sama kader PPP. Transaksi itu diduga berupa dukungan basis politik untuk memenangkan Bupati, dukungan basis politik untuk Pilkada di Jatim, dukungan politik dalam pemilihan Gubernur (waktu itu), dan dukungan politik untuk Pemilu 2014.¹³

Hubungan kepartaian antara SDA, Kiyai Karrar maupun Bupati sangat dekat di samping karena faktor BASRA yang kerap digunakan Kiyai Karrar untuk menyesatkan Syiah. BASRA tiba-tiba bangkit kembali di tengah konflik berdarah di Sampang dengan mendorong pihak terkait seperti MUI setempat untuk menyudutkan Tajul Muluk dan Jamaahnya.¹⁴

Ada ikatan emosial kepartaian antara ulama BASRA dengan PPP. Lembaga yang selanjutnya dimanfaatkan Kiyai Karrar untuk menjadi ormas penyesat Syiah. Tujuan BASRA yang pendirinya adalah pengasuh Ponpes Banyuanyar ditujukan untuk

¹² Pernyataan Ahmad Sahwi ini diungkap oleh Lora Nurut Tamam, Pengasuh Ponpes Alhamidi, Pamekasan.

¹³ “Hertasning Ichlas: Kasus Syiah Sampang Adalah Bagian dari Transaksi Politik” (wawancara) 16 Agustus 2013, dimuat oleh Joyonews.org.

¹⁴ Pascapenyerangan 29 Desember 2012 BASSRA menyusun agenda dan rapat pertemuan serta memberikan rekomendasi kepada ulama Jatim untuk mengeluarkan Fatwa sesat kepada Syiah. Lihat Ita Anistianah, *Elit dan Konflik Komunal Keagamaan*, (Jawa Tengah: Parist, 2012), h. 72.

menyalurkan aspirasi politik ke PPP pada masa Orde Baru untuk bersaing dengan Golkar dan PDIP. BASRA digunakan ulama setempat untuk membendung manuver Soeharto yang banyak menyeret ulama untuk masuk Golkar. Situasi politik berubah, BASRA selanjutnya bubar meskipun mantan-mantan pengurusnya masih ada. Kiyai Karrar dituding melakukan klaim sepihak untuk menyebar kebencian terhadap sesama Muslim.¹⁵

Masyarakat Madura dalam menentukan pilihan politiknya cenderung bermakmum kepada para ulama. Mereka pemegang kendali politik bagi masyarakat Madura, khususnya Sampang. Demikian juga dengan penguasa lokal yang menginginkan dukungan penuh dari ulama yang menguasai kantong-kontong suara politik. Sehingga dalam konteks konflik Sampang para pemangku kebijakan lebih manut kepada para kiyai demi kepentingan politik sehingga masalah ini sulit untuk diatasi.

Pesantren dan Konflik Syiah-Sunni

Penganut Syiah di Pamekasan tampak lebih aman dibandingkan dengan penganut Syiah di Sampang. Padahal Kiyai Karrar dan Pesantrennya, Darut Tauhid, berlokasi di wilayah pamekasan, Proppo. Namun, hampir tidak ada penyesatan terhadap penganut Syiah Pamekasan yang mengarah pada konflik berdarah. Di wilayah Pamekasan dua pesantren besar bermazhab Sunni yakni Bata-Bata dan Banyuanyar tidak menunjukkan sikap bermusuhan secara berlebihan terhadap penganut Syiah di wilayah itu. Bahkan salah satu tokoh pendiri BASRA yang juga pengasuh Pondok Pesantren Banyu Anyar menyesalkan sikap K.Karrar yang menyeret nama BASRA dalam konflik berdarah di Sampang.

Dibandingkan dengan Sampang, Pamekasan masih memiliki ulama-ulama besar toleran seperti K. Damanhuri Fauzi, Pengasuh Ponpes Batu Ampar, Kab. Pamekasan. Bahkan beliau gerah atas manuver-manuver Kiyai Karrar yang terus memojokkan dan menyesatkan Syiah. "*Saya jamin Syiah di Pamekasan aman*", tegas pengasuh pondok pesantren Batu Ampar tersebut.¹⁶

K. Nurut Tamam merupakan sosok ulama Sunni lainnya di Kabupaten Pamekasan. Pengasuh Pesantren Alhamidi ini juga menyangkan sikap ulama yang

¹⁵Kiyai Syadzili, Pengasuh Ponpes Irsyadul Ma'arif di Pamekasan, wawancara 1 Maret 2015 di Desa Lemper, Pamekasan.

¹⁶K. Damanhuri Fauzi, Pengasuh Pesantren Batu Ampar Pamekasan, wawancara 9 Maret 2015, di Batu Ampar.

mengatasnamakan “Sunni” dengan menempuh cara-cara radikal dalam menyelesaikan konflik di Sampang.

Ketokohan ulama-ulama Pamekasan yang toleran tersebut menutup ruang bagi Kiyai Karrar untuk melakukan syiar-syiar penyesatan (*hate speech*) di kawasan Pamekasan bahkan mengecam aksi penyerangan terhadap Jamaah Syiah pimpinan Tajul Muluk.

Pesantren dan Hambatan Penyelesaian Konflik

Mayoritas kiyai di Madura antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan darah, baik ikatan saudara dekat maupun saudara jauh. Dalam konteks konflik di Sampang sebenarnya banyak Kiyai yang tidak setuju dengan langkah yang diambil Kiyai Karrar bahkan mereka menyebut para kiyai yang anti Syiah sebagai kiyai intoleran bahkan Wahabi.

Ketidaksetujuan mereka atas tindak kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang belum diterjemahkan menjadi sebuah gerakan bersama yang konkret, melainkan cenderung bersifat pribadi-pribadi dengan berbagai alasan. Pertama, tidak ingin memutus tali persaudaraan dan silaturahmi di antara mereka. Kedua, tidak ingin terlalu tampil kepermukaan karena khawatir dicap Syiah. Untuk yang terakhir ini memang paling dihindari oleh kiyai-kiyai di Madura karena implikasinya sangat luas, terutama terkait dengan stabilitas umat dan faktor keamanan mereka sendiri di samping secara sosial-politik hal itu juga sangat riskan.

Geo-Politik Timur Tengah?

Di luar faktor-faktor di atas, yang juga dominan dalam menganalisa konflik Sunni-Syiah di Sampang adalah keterkaitannya dengan geopolitik Timur Tengah, khususnya Arab Saudi yang notabene Wahabi di satu pihak, dan Iran yang Syiah di pihak lain. Tak diragukan lagi, kedua negara ini berlomba-lomba berebut pengaruh di negeri-negeri Muslim dan secara khusus di Indonesia, utamanya pasca revolusi Iran. Khawatir dengan pengaruh revolusi Iran yang kian meluas di Indonesia, Arab Saudi melakukan antisipasi dengan memberikan bantuan-bantuan, membangun kampus Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) di Jakarta dan menjadikan Wahabisme sebagai madzhab

resminya.¹⁷ Seturut dengan persaingan dua negara di atas di pentas internasional, konflik Sunni-Syi'ah Sampang oleh sejumlah pihak ditengarai merupakan perpanjangan tangan dari kedua negara tersebut di mana Kiyai Karrar—yang merupakan alumni Arab Saudi—menjadi wakilnya di satu pihak, sementara Ustadz Tajul Muluk sebagai penganut Syi'ah menjadi kepanjangan tangan Iran di pihak lain. Teori konspirasi pun bermunculan menyertai penganut alur berfikir ini di mana kedua belah pihak saling tuduh bahwa negara-negara penyokong sama-sama menggelontorkan dana besar terhadap para penganutnya di Indonesia.

Dalam catatan seorang Indonesianis, Chiara Formichi, diskursus anti-Syiah di Indonesia pada tahun 1980an hingga 1990an memang telah bertransformasi ke dalam bentuk kekerasan fisik yang dimulai sejak tahun 2000an. Dan itu tidak terlepas dari situasi politik internasional, khususnya revolusi Iran. Dalam konteks yang spesifik, rezim Soeharto juga mengalami ketakutan yang sama, khawatir semangat revolusi di Iran diimpor ke Indonesia dan akan mengancam kekuasaannya. Karena itu pada masa Orde Baru, keberadaan komunitas Syi'ah memang sangat dibatasi. Formichi menambahkan bahwa khusus kekerasan terhadap komunitas Syi'ah di Indonesia belakangan, di samping faktor internasional seperti telah disebut, faktor lain juga memberi kontribusi yang sama, dinamika politik nasional (pergantian rezim), hukum yang mengatur kelompok minoritas (fatwa MUI), dan situasi lokal di mana kekerasan fisik itu terjadi tak terkecuali di Sampang, Madura.¹⁸

Faktor Kekhasan Sampang?

Deskripsi dan analisis mengenai gambaran umum konflik seperti dijelaskan di atas tentu saja tidak cukup jika kita tidak melihat faktor Kabupaten Sampang secara historis-geografis yang relatif berbeda dibanding dengan tiga kabupaten tetangganya. Perlu diketahui bahwa komunitas Syi'ah di Madura tidak hanya di Sampang. Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep juga memiliki para penganut Syiah masing-masing. Bahkan di Pamekasan, menurut sumber-sumber lokal, para penganut Syia'hnya justru lebih banyak daripada di Sampang. Fenomena tersebut kerap memunculkan sebuah pertanyaan,

¹⁷Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES & KITLV-Jakarta, 2008), h. 58.

¹⁸Chiara Formichi, "Violence, Sectarianism, and The Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia," *SEAP Indonesia: November 98, October 2004*, Cornell University, h. 1-3.

mengapa hanya di Sampang yang bergejolak hebat, kenapa penganut Sunni dan Syi'ah di wilayah Madura lainnya mampu berbaur satu sama lain dan membuka ruang toleransi sehingga konflik seperti yang terjadi di Sampang tidak pecah? Padahal secara sosial-kultural, Sampang tak memiliki perbedaan yang signifikan dengan tiga kabupaten tetangganya tersebut.

Sebagai analisa sementara, misalnya, kabupaten paling barat di Pulau Madura, Bangkalan, secara teritorial jarak dengan Kabupaten Sampang bisa dikatakan sangat berdekatan karena keduanya memang berdampingan. Mayoritas komunitas Syi'ah di Bangkalan berada di Kecamatan Tanjung Bumi, tepatnya di desa Paseseh, merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kedekatan wilayah tersebut sangat memungkinkan akan terjadinya konflik serupa sebagai implikasi dari konflik Sampang. Tetapi hal itu justru tidak terjadi di Bangkalan. Ulama dan masyarakat Sunni di Bangkalan masih membuka ruang toleransi dengan tidak melakukan penyerangan terhadap komunitas Syiah Bangkalan. Mereka juga hidup berbaur satu sama lain tanpa melihat secara berlebihan keyakinan mereka masing-masing, baik para penganut Syiah maupun penganut Sunni sendiri sebagai mayoritas.¹⁹

Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu di antara empat Kabupaten di Pulau Madura yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sampang (di Sebelah Barat) dan Kabupaten Sumenep (sebelah Timur) justru lebih unik. Penganut Syiah menyebar di beberapa desa tepatnya di Pamekasan bagian Utara yang menyebar di kecamatan Pasean melalui beberapa desa antara lain; desa Tolontoraja, desa Dempo Barat, desa Sana Daya, desa Sotabar. Tidak mudah melacak keberadaan menganut Syiah di Pamekasan dalam bentuk individu-individu karena pada umumnya mereka berpegang teguh pada prinsip taqia yaitu suatu doktrin untuk menyembunyikan identitas ke-Syi'ahan mereka, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki komunitas seperti yang ada di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Jumlah penduduk di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan tersebut mencapai 52,132 jiwa,²⁰ dan ada sekitar 200 kepala keluarga (KK) penganut Syiah yang menyebar di seluruh desa-desa tersebut, bahkan

¹⁹FGD "Pemetaan Analisis Konflik," Surabaya, 14 Maret 2015.

²⁰Data BPS Kab.Pamekasan 2013.

penganut Syi'ah di sana sudah memiliki yayasan yang bernama Yayasan An-Naqi dengan kegiatan majlis ta'lim.²¹

Berbeda dengan Sampang, masyarakat Sunni dan Syiah di Pamekasan melebur tanpa gesekan dalam ruang toleransi. Keduanya saling membaur dalam ritual keagamaan seperti tahlilan, pengajian, ziarah kubur bahkan masjid Sunni kadang dijadikan tempat untuk membaca doa kumail yaitu doa yang biasa dibaca oleh penganut Syiah setiap malam Jumat.²² Bahkan mereka juga saling meminta nama untuk anak-anak mereka yang baru lahir: penganut Syiah meminta nama ke penganut Sunni, dan sebaliknya, penganut Sunni meminta nama ke penganut Syiah.²³ Penganut Syiah di Pamekasan tampak lebih aman dibandingkan dengan penganut Syiah di Sampang. Hampir tidak ada penyesatan terhadap penganut Syiah Pamekasan yang mengarah pada konflik berdarah. Di wilayah Pamekasan dua pesantren besar bermazdhab Sunni yakni Bata-Bata dan Banyuanyar tidak menunjukkan sikap bermusuhan secara berlebihan terhadap para penganut Syiah di wilayah itu.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Sumenep komunitas Syiah sebagian besar terkonsentrasi di pusat kota meski tentu saja ada sebagian kecil para penganutnya di luar wilayah tersebut. Sama seperti di Bangkalan dan Pamekasan, tak ada perseteruan yang berlebihan antara para penganut Syi'ah dengan para penganut Sunni di Sumenep. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlilan, Maulid Nabi, mereka melebur satu sama lain tanpa memperlihatkan perbedaan pemahaman.²⁴ Dan pesantren-pesantren di Sumenep baik pesantren kecil maupun pesantren besar, tak menunjukkan pertentangan yang berlebihan, apalagi permusuhan.

Jika demikian, maka pertanyaannya: faktor mendasar apa yang membuat Sampang berbeda sama sekali dengan tiga kabupaten lainnya dalam soal relasi antara para penganut Sunni dan Syi'ah? Bukankah secara sosial-kultural Pulau Madura justru homogen? Atau karena faktor sejarah masing-masing kabupaten, di mana Sampang pernah mengalami kekerasan komunal, misalnya Perang Sabil (sebelum kemerdekaan),

²¹Faktor ketokohan Habib Abdullah al-Hinduan sebagai sosok penganut Syiah dianggap sebagai faktor tidak adanya gesekan kedua kelompok di daerah tersebut. Wawancara dengan Jakfar Shodiq, Pamekasan, 2 Maret 2014.

²²Wawancara dengan Jakfar Shodiq, Pamekasan, 2 Maret 2014.

²³Wawancara dengan Kiyai Monib, Pamekasan, 3 Maret 2014.

²⁴Wawancara dengan Jakfar Shodiq, Pamekasan, 2 Maret 2014.

Waduk Nipah (1990an) dan kekerasan politik Pilkada (2000-2005) yang menjadi faktor pembeda?

Jika dilihat dari kacamata sosial-historis, intoleransi terhadap komunitas Syia'ah di Sampang yang berujung pada konflik dahsyat merupakan suatu anomali di Pulau Madura. Demikian juga konflik tersebut merupakan konflik yang sama sekali baru, karena sebelumnya belum ada preseden letupan konflik bernuansa agama maupun etnis di wilayah tersebut. Islam Nusantara, sebagai identitas Islam Ahlusunnah Waljammaah (Aswaja) dengan karakteristik toleran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Madura seolah tercerabut dari bumi Sampang. Dari perspektif sosial-kultural, intoleransi dan kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang bisa dikatakan sebagai anomali, berlawanan dengan budaya Madura yang memiliki toleransi sosial yang tinggi dan ikatan kekerabatan yang kuat. Dan hanya persoalan harga diri yang bisa membuat orang Madura berkonflik keras yang termanifestasi dalam carok, itu pun pada umumnya bukan karena dilatarbelakangi oleh pemahaman agama, tetapi karena mengganggu istri, perebutan harta maupun soal irigasi.

Sedangkan konflik kekerasan karena soal keyakinan agama seperti dalam kasus Sampang, sama sekali belum ada catatannya dalam sejarah, karena toleransi orang Madura memiliki dua dimensi sekaligus: toleransi ke luar dan toleransi ke dalam. Toleransi keluar misalnya, kita bisa lihat bahwa di Madura sejak dulu tidak pernah terjadi konflik berbasis etnisitas, seperti karena perbedaan agama atau latar belakang etnik. Berbagai kelompok etnik minoritas dengan keyakinan agama yang berbeda bisa hidup rukun dengan orang Madura yang mayoritas muslim. Hampir semua Kabupaten di Pulau Madura memiliki minoritas Kristen, Katolik, juga ada Buddha, tetapi tak pernah ada satupun dari mereka yang mengalami konflik sedahsyat Sampang. Demikian juga situs-situs budaya, seperti Masjid Agung dan Keraton Sumenep, menjadi bukti integrasi arsitektur etnik yang berbeda: Madura, Jawa, China, dan Barat. Pada toleransi ke dalam, orang Madura menghargai pluralisme paham keagamaan dan aliran politik yang melekat di dalamnya. Di masa kolonial, Syarikat Islam pernah berjaya di Madura; NU dan Muhammadiyah juga tetap hidup berdampingan dengan baik sampai sekarang. Sebagai tokoh informal yang dihormati, para kiai atau ulama, sekalipun mereka memiliki otonomi masing-masing dan berbeda paham keagamaan, tetap bisa saling menghargai satu sama lain.

BAB III

KONFLIK SUNNI-SYIAH SAMPANG DAN MASALAH PENEGAKAN HAM

Secara sederhana, pemahaman tentang penegakan hak asasi manusia pada umumnya dibebankan kepada negara, bukan kepada individu maupun institusi sosial. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini, karena dalam sejarahnya, pencideraan terhadap kemanusiaan sering dilakukan oleh kekuatan besar, baik itu raja, pemerintah, maupun kekuasaan-kekuasaan besar lainnya. Berpijak dari sejarah yang demikian, maka negara diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas penegakan hak asasi manusia secara komprehensif, sedangkan individu hanya diberi tugas untuk menghormati, bukan memenuhi, apalagi melindungi sebagaimana menjadi tugas negara.

Dalam konteks kasus Syiah Sampang, kita perlu mencermati lebih jauh apakah aktor-aktor yang terlibat baik dari perspektif korban maupun pelaku merasa hak-hak dasarnya ada yang dilanggar oleh yang lain, khususnya hak untuk berkeyakinan. Ini adalah perspektif yang sederhana yang paling tepat untuk meneropong kasus Syiah di Sampang. Karena bila menggunakan pendekatan yang lebih maju dengan mengukurnya melalui indikator yang direntang dari yang paling rendah, misalnya 'toleransi,' lalu naik ke level selanjutnya, 'pluralisme,' kemudian berpuncak pada level terakhir, 'kebebasan beragama,' relatif sulit untuk diterapkan. Kesulitannya terletak tidak hanya pada kompleksitas persoalannya yang bermula dari konflik keluarga, tetapi juga dilihat dari struktur masyarakatnya, warga Sampang, dan hampir semua warga Madura, bisa dikatakan relatif homogen. Artinya, tiga indikator di atas (toleransi, pluralisme, dan kebebasan beragama) kurang relevan untuk dijadikan suatu perspektif dalam melihat kasus Sampang.

Mencermati dinamika konflik yang berkembang, klaim bahwa ada pelanggaran terhadap hak-hak untuk berkeyakinan tidak hanya datang dari pihak penganut Syiah semata, tetapi juga dari kelompok-kelompok anti Syiah. Dalam kacamata kelompok yang anti Syiah, justru hak asasi merekalah yang tidak dihormati oleh para penganut Syiah, karena umat mereka yang telah merasa nyaman dengan madzhab atau pemahaman keagamaan yang sudah dianut sejak sebelumnya (Sunni), tiba-tiba diganggu oleh kehadiran pemahaman Syiah yang justru meresahkan masyarakat. Mereka juga menegaskan, bahwa undang-undang telah mengatur masalah ini, di mana setiap orang tidak boleh mendakwahkan agamanya atau keyakinannya kepada orang lain yang telah

beragama dan berkeyakinan. Undang-undang ini, demikian menurut mereka, juga berlaku bagi masyarakat Sampang yang sejak dahulu kala telah menganut Sunni, tiba-tiba tidak dihormati oleh orang-orang penganut Syiah sebagaimana yang disebarluaskan oleh Tajul.²⁵

Menurut salah satu Kiyai di Sampang yang bersentuhan langsung dengan masalah konflik “Syiah-Sunni,” bukan merekalah yang melanggar hak asasi manusia, tetapi justru para penganut Syiah yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam suatu wawancara di Sampang, Ia berpendapat:

“Kami dari dulu mengusulkan ditransmigrasikan saja, itu mungkin lebih manusiawi. Karena bila dipulangkan ke Sampang, nantinya mereka akan diintimidasi oleh masyarakat, itu sama saja memasukkan mereka ke jurang kalau dipulangkan. Kalau ditransmigrasikan, itu ada undang-undangnya juga, manakala ada sebab seperti itu, sebab kemiskinan, keterbelakangan. Itu semua tidak melanggar HAM menurut saya, jadi yang namanya HAM itu jangan didungungkan terus, mau menyelesaikan masalah dituduh melanggar HAM, ini HAM, itu HAM. Semuanya HAM. Saya pernah didatangi orang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Mereka itu lima orang utusan dari PBB, mereka bertanya soal HAM di sini. Mereka bertanya kepada saya, apakah kasus disini melanggar HAM atau tidak? Saya jawab, di sini tidak ada yang melanggar HAM, yang ada melanggar HAM itu di Palestina, Irak, Libiya, Mesir dan di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah itu banyak pelanggaran HAM. Mengapa PBB tidak mengatasi konflik di sana, mengapa diam saja. Mereka diam dan tidak menjawab apa-apa. Yang kedua, yang melakukan pelanggaran HAM itu Syi’ah, di sana paling banyak melanggar HAM. Pertama melecehkan perempuan, disana ada kawin kontrak, itu merupakan pelecehan pada perempuan. Islam mengangkat derajat setinggi-tingginya perempuan, kemudian dilecehkan oleh ajaran Syi’ah.”²⁶

Dalam konteks argumen yang seperti ini, menurut mereka yang anti Syiah, pelanggaran hak asasi manusia bukan dilakukan oleh pihaknya terhadap para penganut

²⁵ Wawancara dengan Kiyai Buchori Ma’sum, Ketua MUI Kabupaten Sampang, 7 Maret 2015.

²⁶ Wawancara dengan salah satu Kiyai di Sampang, 08 Maret 2015.

Syiah, tetapi justru Ustadz Tajul Muluk (pimpinan Syiah Sampang) dan jamaahnya yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati keyakinan kaum Muslim Sampang, madzhab Sunni yang sejak dulu sudah mereka anut. Bahkan Tajul Muluk dan jamaahnya dianggap bukan sekedar tidak menghormati keyakinan masyarakat setempat yang menganut Sunni, tetapi lebih dari itu, Tajul telah membuat keresahan yang amat sangat di kalangan masyarakat awam dengan misalnya mengatakan bahwa Al Qur'an yang diimani oleh kaum Muslim saat ini tidak asli, karena yang asli berada di Lauhul Mahfuz.²⁷

Wacana-wacana yang seperti ini, bagi kalangan kaum Muslim terdidik barangkali tidak terlalu menjadi masalah karena kematangan intelektual mereka yang sudah teruji menghadapi berbagai tantangan intelektual, termasuk dalam soal-soal yang sensitif seperti ini. Apalagi bagi orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi di bidang Teologi, diskursus semacam ini juga sama sekali tidak menjadi masalah karena materi-materi diskusi mereka memang berkaitan dengan tema-tema yang demikian. Tetapi bagi masyarakat awam seperti di Sampang, di mana warganya pendidikan sekolah dasar (SD) saja banyak yang tidak tamat, hal ini bukan hanya menjadi masalah besar, tetapi menimbulkan keresahan yang luar biasa. Keresahan itu berpangkal dari pernyataan bahwa kitab suci yang mereka baca setiap hari dan diimani sedemikian yakinnya sejak mereka diajarkan mengaji waktu kecil, tiba-tiba dianggap tidak asli oleh seorang ustad muda seperti Tajul yang baru merintis pesantren dan baru pulang dari Timur Tengah. Karena itu wajar bila masyarakat merasa resah dengan pendapat tersebut dan kemudian menyampaikan masalah ini kepada ulama-ulama sepuh sekitar yang dianggapnya memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan pendapatnya.

Masalah ini kemudian dikaji, dan direspon dengan berbagai pendapat yang akhirnya bermuara pada keputusan atau fatwa penyesatan oleh MUI Sampang terhadap ajaran Syiah yang dianut dan disebar oleh Tajul. Persis berpijak dari situasi yang seperti inilah, kelompok-kelompok yang anti Syiah berpendapat bahwa keyakinan mereka untuk bermadzhab kepada Sunni sebagaimana telah mereka warisi turun temurun, dilanggar oleh para penganut Syiah dengan menyebarkan isu-isu seperti telah disebutkan pada

²⁷Tuduhan ini diakui oleh Ustadz Tajul menyebar di kalangan masyarakat Omben Sampang, dan menurutnya itu sama sekali tidak benar. Lihat CMARs, *Quod Revelatum: Pleidoi Ust. Tajul Muluk Demi Mengungkap Kebohongan Fakta*, (Surabaya: CMARs, 2013). Dalam sejumlah wawancara dengan berbagai nara sumber di Sampang, masalah ini juga muncul ke permukaan dan menjadi salah satu faktor dalam mengeskalasi konflik.

pokok di atas. Karena itu mereka berpendapat bahwa bukan merekalah yang melanggar hak-hak asasi manusia para penganut Syiah, tetapi justru sebaliknya, para penganut Syiah yang telah melanggar hak-hak berkeyakinan warga dan ulama setempat dengan menyebarkan pendapat yang melahirkan keresahan di kalangan masyarakat awam seperti telah disebutkan. Menyebarkan paham baru (Syiah) kepada orang-orang yang telah punya paham (Sunni), demikian menurut mereka, merupakan pelanggaran karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang:

“Jadi yang menjadi masalahnya sekarang yaitu penyebarannya. Masalahnya adalah penyebarannya mengenai pada orang yang berakidah, paham kalau sudah disebarkan kepada orang lain ini jelas melanggar undang-undang. Dalam undang-undang dijelaskan orang yang beragama tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Penjabarannya orang yang punya paham tidak boleh menyebarkan kepada orang yang mempunyai paham lain karena kalau ini diteruskan akan terjadi resistensi yang tinggi. Dan kalau itu terjadi, maka akan mengakibatkan konflik. Yang disebarkan itu adalah ajaran provokatif, yaitu ajaran menfitnah contohnya mengkafirkan sahabat ini yang menjadi sumber konflik, kalau ini dibiarkan siapa yang mau menerima kata-kata seperti itu.”²⁸

Bila penjelasan di atas memberikan gambaran dari perspektif kelompok anti Syiah yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh para penganut Syiah, maka untuk melihat dinamikanya secara keseluruhan, dari perspektif para penganut Syiah sebagai korban juga akan dikemukakan di sini. Merujuk pada pembahasan seperti telah disebutkan di bagian pertama di atas, konflik ini sesungguhnya berawal dari perbedaan pendapat antara dua orang yang masih sepupu (Kiyai Karrar dan Kiyai Makmun) yang diwariskan kepada anak-anaknya dan kemudian meluas, sampai pada akhirnya terjadi pembakaran dan bentrok, dan hingga kini, para penganut Syiah Sampang masih tinggal di pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo.

Dari perspektif pelaku yang merasa hak-haknya untuk berkeyakinan telah dilanggar oleh para penganut Syiah sebagaimana telah disebutkan, kemudian melahirkan respon

²⁸Wawancara dengan salah satu Kiyai di Sampang, 08 Maret 2015.

yang tidak hanya tidak menghormati hak asasi para penganut Syiah, tetapi lebih dari itu melanggar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala yang lebih luas. Hal itu bisa kita lihat dari sejarah konflik dan kronologi berbagai pertemuan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari para ulama sendiri, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti sedikit disinggung di bagian satu.

Sebelum penyerangan dan pembakaran para penganut Syiah terjadi antara tahun 2010 hingga tahun 2012, mereka sudah berulang kali mendapatkan intimidasi dan pemaksaan dari masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Kiyai Karrar sebagai aktor intelektual di balik konflik ini, berkali-kali melakukan intimidasi terhadap para penganut Syiah Sampang, baik dalam bentuk ceramah maupun dalam bentuk lainnya. Sebelum terjadi penyerangan yang kemudian berbuntut pada pembakaran dan pembunuhan, Kiyai Karrar sempat mengadakan pengajian di sekitar kampung para penganut Syiah, yang menyatakan secara tegas bahwa ulama, masyarakat dan pemerintah perlu berhati-hati dari keberadaan aliran sesat baru, yaitu Syiah yang disebarkan oleh Tajul dan saudara-saudaranya. Dan tak lama setelah itu, ketika para penganut Syiah mengadakan Maulid Nabi dengan mengundang beberapa saudaranya di luar Sampang, juga sempat terjadi pencegahan dari beberapa oknum setempat, dan meminta agar acara tersebut dihentikan karena telah meresahkan masyarakat.²⁹ Dalam konteks ini, para kelompok anti Syiah bukan hanya tidak menghormati hak-hak dasar para penganut Syiah untuk berkeyakinan sesuai dengan apa yang mereka yakini, tetapi lebih dari itu, mereka telah mengancam para penganut Syiah yang ada di Sampang.

Selain dari penyesatan, intimidasi, dan ancaman, ada upaya-upaya pemaksaan agar para penganut Syiah meninggalkan keyakinannya, dan kembali pada aqidah yang benar, yaitu ahlussan wal jamaah. Dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh, baik yang diinisiasi oleh Kiyai Karrar sendiri maupun tokoh-tokoh lainnya, yang mengundang Tajul Muluk untuk memberikan klarifikasi terkait ajarannya, pada akhirnya memaksa Tajul kembali ke jalan yang benardan meninggalkan aqidah Syiahnya. Jika pun usaha-usaha pemaksaan tersebut tidak berhasil, maka kesepakatan minimal yang dipaksakan oleh mereka adalah meminta Tajul Muluk menghentikan segala aktivitas dakwahnya, sekaligus mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa

²⁹Wawancara dengan Ustadz Iklil, Sidoarjo, 26 Februari 2015.

sesat terhadap Syiah seperti terlihat dari hasil Forum Musyawarah Ulama (FMU) saat meminta Tajul Muluk bertobat:

“Mengajak pimpinan Syi’ah Ja’fariyyah (Tajul Muluk Makmun) untuk segera kembali kejalan *ahlu al-sunnah wa al-jama’ah* dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinyabentrok faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. Dan karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidakbertanggungjawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empatkabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesattermasuk aliran syi’ah yang meragukan keabsahan kitab suci Al-Qur’an, keadilan sahabat Nabi dan *ghulu* (berlebih-lebihan) dalam *ahlul al-bait* (keluarga Nabi).”³⁰

Kemudian pada peristiwa terakhir saat terjadi bentrok, pembakaran dan pembunuhan terhadap para penganut Syiah, terjadi pembiaran oleh aparat keamanan terhadap berbagai tindak pengrusakan, pembakaran, dan bahkan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal saat peristiwa itu berlangsung, aparat keamanan berada di lokasi, dan bahkan rencana penyerangan tersebut sudah diketahui jauh-jauh hari oleh kepolisian sektor Omben. Dengan alasan aparat keamanan kalah jumlah dari massa yang sekitar lima ratus orang, mereka tetap membiarkan berbagai tindakan penjarahan, pengrusakan dan pembakaran itu terjadi. Padahal aparat kepolisian yang memiliki perangkat dan senjata memadai, bisa dikatakan mampu untuk mencegah berbagai tindakan tersebut meluas, baik melalui tembakan peringatan, maupun dengan berbagai usaha lain yang bisa mereka lakukan. Ini adalah alasan klasik yang sama sekali tak relevan untuk dijadikan pembenaran terhadap berbagai tindakan melawan hukum yang tidak hanya menghabiskan korban harta, tetapi juga jiwa.

Pembiaran dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar para penganut Syiah tidak hanya berhenti di situ. Saat mereka berada di pengungsian, di GOR Sampang, aparat keamanan dan pemerintah Kabupaten Sampang juga tidak bisa berbuat banyak terhadap tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok intoleran untuk mengusir para pengungsi keluar dari

³⁰“Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang,” KontraS Surabaya, 2012, h. 4.

Sampang. Bahkan yang melakukan demonstrasi di depan GOR menuntut para pengungsi dikeluarkan dari Sampang justru adalah “oknum” pegawai negeri yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Sampang, baik itu pegawai negeri dari Kemenag Sampang, maupun dari Kesbangpol dan instansi-instansi lainnya.³¹

Dengan berbagai dalih keamanan serta menghindari bentrok yang lebih besar saat Istighasah diadakan oleh sejumlah ulama di Sampang yang lokasinya berdekatan dengan GOR tempat pengungsi Syiah, pihak kepolisian bukan malah melindungi para pengungsi dari tekanan-tekanan tersebut, tetapi mereka justru meminta para pengungsi untuk keluar dari Sampang dan kemudian dibawa ke Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo. Tak diragukan lagi, para pengungsi akhirnya direlokasi ke Sidoarjo setelah pimpinan mereka, Ustadz Iklil yang bersikukuh ingin tetap bertahan di GOR, pingsan tak sadarkan diri setelah kelelahan dengan berbagai peristiwa yang menyertai sebelumnya. Berbagai rentetan peristiwa di atas menunjukkan dengan kasat mata kepada kita bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bentuk dan tingkatan telah terjadi terhadap penganut Syiah Sampang.

BAB IV

STRATEGI DAN POLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Yang Paling Korban (*competitive victimhood*)

Salah satu penyakit bawaan dari konflik komunal adalah munculnya suatu gejala yang dalam psikologi perdamaian disebut “*competitive victimhood*.” Gejala ini bisa didefinisikan ‘adanya saling klaim subjektif antara kelompok yang terlibat dalam konflik, yang menyatakan bahwa satu kelompok (mereka) yang paling korban (menderita) dibandingkan kelompok lain.’ Klaim ini bertujuan tidak hanya ingin dianggap yang paling korban (menderita), akan tetapi juga ingin dianggap sebagai kelompok yang paling diperlakukan tidak adil oleh kelompok lainnya.³²

Menurut Dr. Ichsán Malik, pakar resolusi konflik, gejala *competitive victimhood* ini muncul dalam proses rekonsiliasi atau perdamaian paska konflik, dan biasanya memberikan kontribusi pada gagalnya program pemberdayaan dan integrasi dari

³¹FGD “Pemetaan Analisis Konflik,” Surabaya, 14 Maret 2015.

³²Dr. Ichsán Malik, “Damai di Patani,” artikel diakses dari: <http://www.deepsouthwatch.org/node/5594>.

masyarakat yang telah terbelah akibat konflik. Ia memberikan eksemplar terkait gejala ini yang diidap oleh kelompok-kelompok yang bertikai pada konflik di Maluku. Menurutnya, baik kelompok Islam maupun kelompok Kristen di Maluku berlomba-lomba untuk merasa bahwa merekalah yang paling dikorbankan pada masa konflik, merekalah korban ketidakadilan. Dampak dari gejala ini, begitu ia berpendapat, terlihat dalam bentuk mereka saling berlomba-lomba untuk mengambil “kesempatan” dalam “kesempitan” dalam setiap program pemberdayaan.³³

Dengan merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh para ahli, Dr. Ichsan Malik menambahkan bahwa, apabila kompetisi sebagai korban berkurang, maka yang muncul adalah mulai timbulnya rasa percaya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; juga munculnya empati antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak boleh ada kelompok yang merasa paling menderita, semua kelompok harus dianggap memiliki penderitaan yang sama.³⁴

Gejala *competitive victimhood* ini juga terjadi pada konflik Syiah Sampang, di mana pihak-pihak terkait yang terlibat dalamnya mengklaim diri adalah kelompok yang paling dirugikan dari konflik tersebut. Sebagian tokoh dan ulama yang notabene menjadi aktor dari konflik ini dirugikan karena merasa dipermainkan oleh Tajul; masyarakat juga mengklaim demikian, karena aqidahnya terganggu; Pemerintah Kabupaten Sampang pun juga merasa dirugikan karena anggaran Pemkab yang sedianya dialokasikan untuk program lain, terpaksa dialihkan pada penyaluran bantuan untuk para pengungsi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang disebabkan oleh konflik tersebut. Semua merasa yang paling korban; semua merasa yang paling menderita; dan semua merasa yang paling diperlakukan tidak adil.

Dalam konteks merasa yang paling korban dan paling dirugikan ini, salah satu pejabat yang bernaung di instansi Pemkab Sampang mengatakan bahwa bukan keuntungan yang mereka dapatkan dari konflik tersebut, tetapi justru kerugian yang banyak. Karena dana-dana yang sudah ada alokasinya terpaksa harus digeser untuk keperluan-keperluan lain yang diakibatkan oleh konflik:

“Di Sampang, bukan keuntungan melainkan kerugian yang banyak. Kerugian juga menghabiskan uang PEMDA termasuk juga dari Kemenag itu selalu

³³Dr. Ichsan Malik, “Damai di Patani,”

³⁴Dr. Ichsan Malik, “Damai di Patani,”

ditempati aparat Brimob, kami juga mengalami kerugian. Kami tidak mempunyai anggaran seperti itu karena meskipun diajukan juga tidak akan turun. Kita selaku aparat juga harus bertanggung jawab.”³⁵

Tak hanya aparat pemerintah, pada kesempatan lain, sebagian para tokoh dan kiyai juga merasa bahwa merekalah yang dirugikan dari konflik ini. Mereka dibuat resah oleh Tajul dengan menyebarkan paham-paham kontroversial dan sesat. Situasi itu mau tak mau harus merespon agar kenyamanan dan keamanan masyarakat tidak terganggu:

“Padahal ulama tidak ikut campur, hanya saja menjaga keamanan saja, menjadi penengah dari masyarakat. Karena yang terganggu bukan ulama, melainkan masyarakat yang merasa dilecehkan aqidahnya oleh Syiah ini. Kami-kami ini para ulama mendapat pengaduan dari masyarakat, dan masyarakat meminta kami untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengganggu aqidah mereka. Jadi hanya itu tugas kami.”³⁶

Yang tampak “aneh” dari gejala *competitive victimhood* pada konflik Sampang ini adalah yang menimpa korban utamanya, yaitu komunitas Syiah di bawah pimpinan Tajul Muluk. Dikatakan aneh karena dibaca dari beberapa ikhtiar rekonsiliasi dan pemulangan para pengungsi ke Sampang, justru respon sebagian elitnya kurang mengembirakan di mana mereka tak mau “buru-buru” pulang kampung. Tanggapan yang demikian ini, membuat sejumlah inisiator dan mediator “curiga” bahwa sebagian elite pengungsi Syiah hendak memelihara dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Karena menurut mereka, tak bisa dipungkiri bahwa konflik Syiah ini telah menjadi komoditas yang memberikan banyak keuntungan juga bagi banyak pihak sesuai dengan level sosial mereka masing-masing.³⁷

Dan persis seperti telah dijelaskan di atas, penyakit bawaan konflik komunal dalam bentuk *competitive victimhood* ini relatif menghambat proses rekonsiliasi di mana hampir semua pihak sama-sama menutup diri terhadap seluruh proposal yang diajukan inisiator atau mediator untuk jalan penyelesaian. Hal itu bisa dicermati dari sikap sebagian

³⁵Wawancara dengan salah satu aparat pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Sampang, 6 Maret 2015.

³⁶Wawancara dengan Kiyai Karrar, Pamekasan, 12 Maret 2015.

³⁷Wawancara dengan Lora Nurut Tamam, Pamekasan, 10 Maret 2015.

masyarakat, ulama dan pemerintah di Sampang dan juga Pamekasan yang tak mau menerima keputungan pengungsi, jika dan hanya jika, mereka tak melakukan *taubatun nasuha* dengan kembali ke aqidah ahlussan wal jamaah dan meninggalkan kesyiahan mereka. Dan atas penyakit bawaan *competitive victimhood* yang semua kelompok merasakan diri mereka sebagai korban inilah, pencegahan dan penanganan konflik Syiah Sampang bisa dikatakan “buruk.”

Penanganan dan pencegahan konflik

Menurut Tajul Muluk, ada dua peristiwa penting yang membuat masalah Syiah Sampang menjadi semakin tak terkendali. *Pertama*, adalah ketika Kiyai Karrar mengundang Tajul Muluk untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan dan hanya melibatkan keluarga inti mereka (antara keluarga Tajul Muluk dan Kiyai Karrar) yang sebelumnya sudah mewarisi perbedaan pendapat yang begitu mengkristal, terutama antara Kiyai Makmun, Bapaknya Tajul Muluk, dengan Kiyai Karrar sepupunya sendiri. *Kedua*, titik balik yang lain yang membuat konflik semakin eskalatif adalah perpecahan aliansi antara Tajul Muluk dengan adiknya, Roisul Hukama. Keretakan aliansi ini bukan karena Roisul Hukama tiba-tiba sadar bahwa Syiah yang ia anut salah atau sesat sebagaimana dituduhkan oleh banyak kiyai, tetapi didorong oleh persoalan “dendam” pribadi dengan Tajul Muluk, baik itu terkait dengan perebutan santri, masalah perempuan, dan lain sebagainya.

Terkait yang pertama, Tajul Muluk menjelaskan bahwa pada suatu waktu ia diundang oleh Kiyai Karrar untuk menyelesaikan masalah Syiah dengan cara kekeluargaan dan juga terbatas di kalangan keluarga-keluarga mereka. Tetapi ketika Tajul datang ke acara tersebut, yang menghadiri pertemuan itu bukan hanya keluarga-keluarga mereka masing-masing, baik dari pihak Tajul maupun dari pihak Kiyai Karrar. Banyak orang yang hadir, termasuk perwakilan ulama-ulama dari seluruh kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) hadir, termasuk juga aparat pemerintah Sampang. Dalam pertemuan tersebut, Tajul disidang dan sekaligus dihakimi bahwa apa yang ia ajarkan adalah sesat, harus dihentikan dan kembali pada aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dalam situasi disudutkan seperti itu, Tajul mengeluarkan argumen-argumen berdasarkan dalil-dalil yang kuat, sekaligus menyodorkan referensi lengkap kitab-kitab apa saja yang dirujuk bahwa yang ia yakini sama sekali tidak sesat. Kiyai Karrar kewalahan menghadapi argumentasi Tajul tersebut, dan ia merasa dipermalukan oleh

Tajul di hadapan para ulama-ulama Madura dan aparat-aparat pemerintah. Dari situ, demikian menurut Tajul, Kiyai Karrar semakin provokatif:

“Pertama itu kesalahan Karrar, seharusnya masalah ini masalah kekeluargaan, tahun 2006 saya dipanggil sama Kiyai Karrar, saya menyangka mau diselesaikan secara kekeluargaan. Saya itu dipanggil ke Omben, ke tempatnya H. Sa’di. Ternyata Kiyai Karrar ini mengundang Kiyai se Madura, jadi saya itu dihakimi di sana, ada beberapa tuduhan dituduhkan kepada saya semua. Akhirnya saya menjawab panjang lebar, sampai dia panas di forum itu. Akhirnya Karrar merasa malu karena merasa dipojokkan balik dengan semua argumen saya itu. Akhirnya semenjak itu Kiyai Karrar ini mulai dan terus memprovokasi masyarakat. Seharusnya Karrar jangan begitu, seharusnya kalau kekeluargaan itu Kiyai Karrar sama yang dekat-dekat saja. Sama orang tua saya, keluarga saya dan bicarakan secara baik-baik. Kan saya sendiri ponakannya sendiri kan seharusnya baik-baik menyelesaikan masalah ini, tapi ternyata Karrar ini memakai cara seperti ini.”³⁸

Beberapa Peristiwa Penting Konflik Sunni-Syiah Sampang³⁹

No.	Tanggal	Kejadian
1.	26 Februari 2006	Sebagai kelanjutan dari pertemuan tgl 24 Ferbuari, sejumlah kiai yang kali ini diketuai Abd. Wahhab Adnan bersama dengan ketua MUI Sampang padamasa itu Mubassyr dan Kapolsek Omben mengundang Tajul Muluk di Masjid Landeko'Karanggayam di tempat kediaman kakek Tajul (Kyai Nawawi). Resminya pertemuan inibernama Forum Musyawarah Ulama (FMU) Sampang-Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri oleh semua yang hadir pada pertemuan

³⁸Wawancara dengan Tajul Muluk, 5 Juni 2015.

³⁹Dikompilasi dari berbagai sumber. Lihat juga, Prof. Syamsul Arifin, “Konstruksi Sosial Terhadap Kaum Minoritas: Dari Konflik ke Rekonsiliasi “Su-Syi” (Sunni-Syiah), Mungkinkah?; Lihat juga Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang, KontraS Surabaya, 2012.

26 Februari 2006, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban Tajul Muluk. Tajul Muluk hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Syiah yang diajarkan tidak sesat, merupakan salah satu madzab yang diakui dalam dunia Islam, dan dirinya tidak bersedia keluar dari Syiah. Karena tidak bisa merubah keyakinan Tajul, akhirnya FMU mengeluarkan keputusan yang isinya sebagai berikut:

Mengajak pimpinan Syi'ah Ja'fariyyah (Tajul Muluk Makmun) untuk segera kembali ke jalan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat umum yang sangat dikhawatirkan terjadi. Dan karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidak bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empat kabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran Syi'ah yang meragukan keabsahan kitab suci al-Qur'an, keadilan sahabat Nabi dan berhulu (berlebih-lebihan) dalam Ahlu al-Bait (keluarga Nabi).

2. 09 April 2007

Pada 09 April 2007, Tajul Muluk bersama keluarga dan santri-santrinya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan di rumahnya yang satu kompleks pesantrennya. Dalam kegiatan Maulidan ini turut diundang sejumlah Ustadz dan Ikhwan Syiah dari luar Sampang. Belum lagi Maulidan dimulai, ribuan massa dari beberapa desa yang bersenjata aneka ragam senjata tajam, kayu dan pentungan mengepung jalan masuk menuju desa

Karang Gayam dan melakukan penghadangan terhadap semua tamu

undangan yang datang. Massa dengan teliti mengawasi dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat, semua pengendara mobil yang melintas diwajibkan melambatkan laju kendaraannya. Untuk menghindari jatuhnya korban, sejumlah aparat dari Polres Sampang dan anggota TNI dikerahkan menjaga keamanan di sekitar rumah Tajul Muluk. Acara Mauludan tetap dilaksanakan dibawah pengawasan dan penjagaan aparat keamanan.

3. 17 September 2009 Ratusan massa anti syiah bergerak mengepung Nangkernang, dilain pihak, warga jamaah syiah bersiap akan melawan. Kekerasan bisa dihindari, setelah aparat keamanan membubarkan massa. Kejadian ini dipicu oleh penolakan Tajul Muluk untuk menghadiri suatu pertemuan yang diinisiasi beberapa ulama. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan komunitas syi'ah di Nangkernang.

4. 26 Oktober 2009 Dalam suasana bulan Ramadhan, PC NU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan akifitas dakwah Tajul Muluk dan jamaah syiah di wilayah Kecamatan Omben. Pada intinya pertemuan ini adalah forum para ulama untuk menghakimi ajaran syiah yang disebarkan oleh Tajul Muluk sebagai ajaran sesat. Dalam pertemuan ini Tajul Muluk diberikan sejumlah 32 pertanyaan tentang ajaran-ajaran syiah yang dianggap sesat. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang berisikan bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syiah

diSampang. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab.Sampang, Depag Kab. Sampang, PC NU Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan surat bersama yang isinya :

1. Bahwa Tajul Muluk tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran syiah karena sudah meresahkan warga.
2. Bahwa Tajul Muluk bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaranaliran tersebut di Kabupaten sampang.
3. Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan / atau dakwah maka Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.
5. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) menaati kesepakatan di poin (1) dan (2). Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh MUI Kab.Sampang, Ketua DPRD Kab. Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Depag Kab.Sampang, KA Bakesbangpol Kab. Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i kamtibmas.

5. 29 Desember 2011 Warga anti-Syiah membakar rumah pengikut Syiah. Jumlah rumah yang dibakar sebanyak 4 rumah: 2 rumah Iklil, 1 rumah Hani dan 1 rumah milik Tajul Muluk. Pembakaran rumah tersebut dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 1000 orang yang berasal dari 4 desa yaitu Desa Karang Gayam, Desa Pandeng, Desa Blu'uran dan Desa Tlambah.

Setelah aksi pembakaran tersebut, sekitar 300 pengikut Syiah diungsikan ke Gedung Olah Raga (GOR), Sampang.

6. 1 Januari 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa tertanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan ajaran yang dibawa Tajul Muluk adalah sesat dan merupakan penistaan terhadap Islam.
7. 02 Januari 2012 PCNU Kabupaten Sampang mengeluarkan surat pernyataan yang mendukung fatwa MUI Kabupaten Sampang.
8. 03 Januari 2012 Badan Silaturahmi Ulama Madura (BASRA) meminta MUI Pusat dan MUI Jawa Timur untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Syiah, dan meminta kepada Pemkab Sampang agar melarang ajaran Syiah di Madura.
9. 26 Agustus 2012 Kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang Madura Jawa Timur kembali terjadi. Pada sekitar pukul 08.00 WIB ratusan massa bersenjata tajam seperti celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di kampung Nangkernang untuk menghadang keberangkatan anak-anak warga pengikut Syiah ke pondoknya di Bangil dan Pekalongan. Ada imbauan yang disampaikan melalui pengeras suara di musholla-musholla, termasuk musholla milik Roisul Hukama—adik Tajul Muluk yang belakangan menyatakan keluar dari paham Syiah—agar warga berkumpul menghadapi para penganut Syiah.
10. 20 Juni 2013 Sekitar 168 penganut Syiah Sampang direlokasi paksa oleh Pemerintah Kabupaten Sampang ke Rumah Susun Puspo Agro, Sidoarjo.

11. 23 Juli 2013 Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Sebagian pihak menilai latar belakang keluarnya Pergub ini karena terjadinya kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang Madura beberapa waktu sebelumnya yang diikuti oleh terbitnya fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan ajaran Syiah sesat. Pergub ini seolah memberi legitimasi terhadap fatwa MUI tersebut.

Berbagai rentetan peristiwa penting seperti telah disebutkan di atas, memperlihatkan betapa strategi pencegahan dan penanganan konflik Syiah Sampang berjalan timpang, kurang memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dari para korban. Dan ini yang membuat proses penyelesaian konflik tersebut menjadi sulit. Kesulitan penyelesaian konflik Syiah Sampang bukan hanya karena kelompok-kelompok yang anti mereka memiliki kekuatan yang penuh, tetapi lebih dari itu, aparat keamanan dan pemerintah Kabupaten Sampang tidak memiliki perspektif yang benar terkait tugas dan wewenang mereka dalam melindungi seluruh warganya. Hal itu diperlihatkan dari pola dan strategi mereka dalam mencegah dan menangani konflik Sampang, di mana mereka tidak menjadi payung di antara pihak-pihak yang bertikai, tetapi justru subordinat atau tunduk kepada keputusan-keputusan ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang anti Syiah.

Dari berbagai pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, baik mulai awal-awal ketika tidak terjadi bentrok hingga kini saat pemerintah membentuk Tim Rekonsiliasi, kelihatan sekali, baik pemerintah Kabupaten Sampang maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan tokoh-tokoh yang anti Syiah. Padahal jumlah yang anti Syiah, secara khusus di Sampang, tokoh-tokohnya hanya bisa dihitung dengan jari, dibandingkan dengan para kiyai yang begitu banyak sekali yang sesungguhnya tidak setuju dengan penyelesaian seperti yang sudah terjadi. Akan tetapi mereka memilih diam karena bila mendukung penyelesaian yang saling menguntungkan satu sama lain, maka akan dituduh sebagai mendukung dan penganut Syiah. Tuduhan yang demikian dihindari oleh para kiyai karena itu berimplikasi sangat luas bagi para kalangan kiyai di Madura.

BAB V KESIMPULAN

Konflik Sunni-Syiah Sampang pada mulanya hanya perbedaan pendapat dan madzhab antara keluarga penganut Syiah, Kiyai Makmun (Omben, Sampang) dengan Kiyai Ali Karrar Shinhaji, penganut Sunni (Proppo, Pamekasan). Mereka berdua masih sepupu. Perbedaan pendapat ini tak menimbulkan apa-apa sampai Kiyai Makmun wafat pada 2004. Setelah itu, yang meneruskan Kiyai Makmun ini adalah anaknya, Ustadz Tajul Muluk, Ustadz Raisul Hukama dan juga Ustadz Iklil. Ustadz Tajul, berani mendakwahkan madzhab Syiah secara terang-terangan kepada masyarakat. Dakwah ini kemudian mendapat respon dari Kiyai Ali Karrar, pamannya sendiri. Dalam suatu acara Maulid Nabi di Sampang, Kiyai Karrar becaramah, dan secara terang-terangan menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dengan adanya dakwah Syiah yang sesat yang disebar oleh Tajul dan saudara-saudaranya. Sejak saat itu konflik mulai naik ke permukaan. Kiyai Karrar kemudian mendapat dukungan dari sejumlah Kiyai Sampang, sebagian masyarakat, dan sebagian lagi adalah para preman.

Pada saat yang sama, terjadi pergeseran struktur sosial di masyarakat, di mana otoritas kiyai dan aparat pemerintah lokal mulai berkurang berkat kepedulian, kebaikan dan terobosan-terobosan Ustadz Tajul atas masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat. Ia menuai simpati yang relatif bagus atas prestasinya ini. Situasi ini kemudian dipenetrasi oleh gemuruh politik Sampang menjelang Pilkada, di mana berbagai isu baik yang positif dan negatif berseliweran memanfaatkan potensi konflik ini. Dalam situasi ini, keluarga Ustadz Tajul malah pecah secara internal, terutama antara dia dengan adiknya, Raisul Hukama, terkait masalah perempuan yang disukai Rais tetapi dipersilahkan menikah dengan orang lain oleh Tajul. Atas situasi inilah, meski Rais pada mulanya adalah perintis dan penganut Syiah di desanya, namun karena dendam atas masalah ini, ia lalu memfitnah madzhab dan kakaknya sendiri secara ekstrim. Ia kemudian beraliansi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah beberapa kali berusaha menyerang dan mengusir penganut Syiah di sana. Peristiwa ini membuat Tajul dan jamaahnya semakin terdesak dan kehilangan kekuatan karena dikepung tidak hanya oleh musuh-musuh sebelumnya, tetapi juga ditikam oleh adiknya sendiri.

Masalah yang semakin kompleks ini, setelah berbagai pertemuan dilakukan untuk mencari penyelesaian gagal disepakati, maka terjadilah pembakaran dan pengusiran

pesantren/rumah-rumah penganut Syiah dari Omben/Karang Penang Sampang pada akhir tahun 2012. Para penganut Syiah kemudian diungsikan ke kantor kecamatan Omben, dan kemudian dibawa ke GOR Kabupaten Sampang.

Beberapa tahun kemudian, tak puas karena para penganut Syiah masih ada di GOR Sampang, sejumlah kiyai yang sebelumnya memaksa penganut Syiah untuk bertobat ke Sunni, menggalang tabligh akbar besar-besaran di alun-alun dekat GOR Sampang dengan tujuan mengusir para pengungsi keluar Sampang. Karena kepolisian merasa khawatir dengan situasi keamanan pada tabligh akbar tersebut, maka aparat kepolisian meminta dan memaksa membawa pengungsi keluar Sampang untuk dibawa ke Sidoarjo. Meski mereka tidak mau, dan pimpinan mereka, Ustadz Iklil sedang sakit, kemudian pingsan, pada saat itulah semua pengungsi dibawa keluar Sampang, menuju Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo.

Terjadi pembiaran oleh aparat keamanan terhadap peristiwa pembacokan, pembakaran dan pengusiran penganut Syiah di Kecamatan Omben dan Karang Penang. Meski aparat kepolisian sudah tiba di TKP saat tragedi tersebut, tetapi mereka tetap membiarkan tragedi itu berlangsung karena dengan alasan klasik: jumlah mereka jauh lebih sedikit dari massa yang kurang lebih 500an dengan membawa senjata tajam dan mengancam aparat kepolisian bila aparat mencegah tindakan massa. Aparat hanya menjemput jamaah Syiah yang belum menjadi korban, diungsikan ke kantor kecamatan dan kemudian dibawa ke GOR Kabupaten Sampang.

Pemerintah Kabupaten Sampang tidak bertindak sebagai pemerintah yang harus memayungi seluruh warganya dari berbagai ancaman keamanan dan apapun. Juga tidak bisa mencari resolusi konflik yang sedang menimpa warga mereka tanpa intimidasi dan pemaksaan. Tetapi pemerintah justru menjadi corong ulama dan sebagian masyarakat yang menginginkan warga Syiah keluar dari Sampang. Pemerintah tersubordinasi oleh otoritas-otoritas para Kiyai di Sampang yang mengklaim diri tergabung dalam BNM (BASRA, NU, dan MUI) yang memang anti Tajul dan Syiah Sampang.

Situasi di Kecamatan Omben dan Karang Penang kondusif, tetapi masih ada satu Kompi Brimob yang masih berjaga-jaga di antara dua kecamatan ini. Sebagian besar masyarakat tetangga penganut Syiah yang mengungsi, merasa kehilangan saudara mereka bukan hanya karena masih famili/bersaudara di antara mereka, tetapi juga karena tradisi-tradisi yang sudah lama mereka bangun, saling membantu dalam berbagai

pekerjaan (sawah dll) tak bisa mereka lanjutkan karena tetangganya pada mengungsi ke Sidoarjo.

Sebagian besar tetangga-tetangga yang di Omben dan Karangpenang sering bersilaturahmi ke Sidoarjo, tidak hanya saling meminta maaf, tetapi juga membuat acara bersama di Sidoarjo seperti Maulid Nabi dll. Mereka berharap saudara-saudara/tetangga-tetangganya yang saat ini sedang mengungsi di Sidoarjo segera kembali ke Sampang dan memulai hidup sebagaimana mereka lalui sebelum-sebelumnya. Demikian juga para pengungsi di Sidoarjo, mereka juga berharap bisa segera pulang ke kampung halamannya untuk memulai kehidupan sebagaimana sebelumnya ia lalui dengan saudara-saudaranya/tetangga-tetangganya.

Akan tetapi harapan para pengungsi untuk pulang kembali ke Sampang sampai saat ini belum jelas karena Tim Rekonsiliasi masih tak menemukan formulasi yang baik untuk kedua belah pihak. Sampai sejauh ini belum ada terobosan-terobosan yang menggembirakan bagi kedua belah pihak, dan karena satu dan lain hal, Tim Rekonsiliasi malah berhenti bekerja.

Situasi ini diperparah oleh sikap sejumlah elite-elite di Sampang, baik dari kalangan ulama, oknum masyarakat maupun pemerintah, yang tak menginginkan para pengungsi ini pulang dan lebih baik ditransmigrasikan ke tempat-tempat tujuan transmigrasi. Jika mereka mau dipulangkan, syaratnya adalah bertaubat dengan taubatun nasuha, menandatangani surat pernyataan taubat, dan akan dipantau/ditinjau terus-menerus oleh para ulama taubat mereka itu, apakah tetap istiqamah atau kembali melenceng. Jika dalam 5 tahun para ulama menilai bahwa mereka istiqamah dengan taubatnya, maka mereka diperbolehkan tinggal di Sampang untuk selamanya.

BAB VI REKOMENDASI

Saat ini, kunci penyelesaian konflik Sunni-Syiah Sampang berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat harus bertindak tegas dalam menyelesaikan persoalan ini dengan memulangkan para pengungsi ke kampungnya masing-masing. Sudah tak ada lagi yang diharapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sampang karena mereka tak memiliki inisiatif serta strategi penyelesaian yang ajeg dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi situasi konflik semacam ini, pemerintah Kabupaten Sampang tidak boleh ter subordinasi atau tunduk pada keinginan-keinginan kelompok-kelompok intoleran, baik itu ulama, oknum pemerintah maupun masyarakat. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Sampang memperlihatkan dirinya tak memiliki otoritas apa-apa di luar pemberian bantuan logistik kepada korban, karena keputusan-keputusan strategisnya selalu mengacu kepada keputusan para ulama, baik MUI, NU, BASRA maupun yang lainnya.

Aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, tak boleh memosisikan dirinya hanya sekedar sebagai “pengaman” atas konflik yang muncul di masyarakat, tetapi lebih dari itu, mereka harus melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman apa pun, melakukan penegakan hukum secara tegas, serta menjamin rasa aman masyarakat. Melakukan pembiaran terhadap berbagai tindak “pengrusakan, “pembakaran,” dan “pembunuhan” dengan alasan karena kalah jumlah dengan “massa” adalah alasan yang sama sekali tidak relevan. Keberadaan mereka yang mewakili negara dan didukung dengan tenaga terlatih, sistem, perangkat, dan peralatan keamanan yang memadai, tak memiliki alasan yang kuat untuk membiarkan tindakan-tindakan melawan hukum.

Perlu ada kekuatan penyeimbang dan pendekatan persuasif dari tokoh-tokoh dan kiyai-kiyai moderat dalam menghadapi konflik seperti yang terjadi di Sampang. Karena diam dan absennya suara mereka dalam konflik yang seperti ini memberikan ruang yang leluasa kepada tokoh-tokoh dan kiyai-kiyai intoleran—meskipun jumlahnya sedikit—untuk mendapatkan panggung sehingga situasi semakin kompleks dan rumit.

Para penganut Syiah Sampang harus berdakwah dengan tetap mempertimbangkan situasi lokal (etika dan kearifan lokal), menghindari hal-hal yang kontraproduktif serta isu-isu yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat awam. Tanpa itu, meskipun mereka dipulangkan ke kampung halamannya, maka akan tetap memancing konflik lanjutan yang bisa berkepanjangan dan semakin sulit diselesaikan.

Rekomendasi program

1. Membangun jaringan dengan kiyai-kiyai dan pesantren-pesantren di Madura yang pengaruhnya besar untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada perdamaian serta memperkuat kelompok-kelompok moderat.

2. Bekerjasama dengan pesantren-pesantren, CSRC perlu melakukan program-program perdamaian, dengan pendekatan kultural untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak warga negara atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program-program ini ditujukan kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa.
3. Secara khusus, para kiyai, tokoh-tokoh masyarakat dan para santri untuk membuat program yang di dalamnya terjadi dialog dan diskusi bersama dengan tokoh agama lintas mazhab dan juga lintas agama.

Daftar Pustaka

- AMAN (The Asian Muslim Action Network) Indonesia, *Dilema Kebebasan Beragama di Indonesia: Studi Kasus Pembakaran Rumah Ibadah di Sampang Madura*, 2012.
- Anistianah, Ita, *Elit dan Konflik Komunal Keagamaan: Studi Kasus Konflik Syiah Sampang*, (Jawa Tengah: Parist, 2012).
- Arifin, Prof. Syamsul, “Konstruksi Sosial Terhadap Kaum Minoritas: Dari Konflik ke Rekonsiliasi “Su-Syi” (Sunni-Syiah), Mungkinkah?” (Paper Dipresentasikan pada Mei 2015 di Surabaya).
- CMARs, *Quod Revelatum: Pleidoi Ust. Tajul Muluk Demi Mengungkap Kebohongan Fakta*, (Surabaya: CMARs, 2013).
- Data BPS Kabupaten Pemekasan Tahun 2013.
- FGD “Pemetaan Analisis Konflik,” Diselenggarakan oleh CSRC UIN Jakarta, Surabaya, 14 Maret 2015.
- Formichi, Chiara, “Violence, Sectarianism, and The Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi’a Discourses in Indonesia,” *SEAP Indonesia: November 98, October 2004*, Cornell University.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES & KITLV-Jakarta, 2008).
- “Hertasning Ichlas: Kasus Syiah Sampang Adalah Bagian dari Transaksi Politik” (wawancara) 16 Agustus 2013, dimuat oleh www.joyonews.org.
- Klinken, Gerry van, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Obor dan KITLV, 2007).
- KontraS Surabaya, “Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang,” (Surabaya: KontraS Surabaya 2012).
- Malik, Dr. Ichsan, “Damai di Patani,” artikel diakses dari: <http://www.deepsouthwatch.org/node/5594>.